

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada keperluan publik, maka organisasi ini tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Organisasi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, dan beberapa hal lainnya. Organisasi sektor publik dalam praktiknya kini mulai diwarnai dengan munculnya fenomena untuk menguatkan akuntabilitas atas kinerja organisasi-organisasi publik tersebut, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kejelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah merupakan substansi pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: (a) pemerintah sebagai penguasa dan pengendali sumber-sumber dana kepada publik, (b) penggunaan sumber-sumber tersebut berdampak luas bagi kesejahteraan publik. Pemerintahan dituntut untuk melakukan tata kelola yang lebih baik, terutama dalam penyampaian informasi keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah didorong untuk menyajikan laporan keuangan yang tertib, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan organisasi atau perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, dengan tujuan untuk kelengkapan dari suatu entitas tersebut. Adapun komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arua Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Indikator dalam kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Penyajian laporan keuangan harus memenuhi unsur akuntabel karena laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang menjadi tolok ukur apakah pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi pembanding antara pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditentukan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan beberapa pihak berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas berkaitan erat dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, laporan keuangan daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijadikan acuan apakah laporan keuangan daerah sudah disusun dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dimana nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 tentang akuntansi investasi, PSAP 07 tentang aset tetap, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dan pengerjaan, PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 tentang laporan operasional. Pemeriksaan laporan keuangan daerah akan dilakukan setiap

tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian berupa opini (Rahayu, 2014). Ada 4 jenis opini penilaian yang akan diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Seperti data dibawah ini yang memperlihatkan tentang opini yang diperoleh Kota Kupang dalam dua tahun terakhir:

Tabel 1.1
Opini BPK

Tahun	Opini
2020	WTP
2021	WTP

(Sumber : <http://ntt.bpk.go.id>)

Dari tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Kota Kupang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada yaitu (1) Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tiga organisasi perangkat daerah. Ketiga organisasi perangkat daerah tersebut antara lain: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2) Penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Kupang belum tertib. Pada tahun 2021 Kota Kupang mendapat opini WTP lagi namun BPK masih menemukan beberapa masalah yaitu (1) Pengelolaan pendapatan belum memadai, (2) Pengelolaan aset tetap belum memadai dan (3) Kesalahan penganggaran belanja modal dan barang dan jasa pada dua organisasi perangkat daerah. Kedua organisasi

tersebut antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut masih ditemukannya sumber temuan yaitu lemahnya sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Undang-Undang. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Muliady, 2017). Indikator dalam sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta evaluasi (V. Wiratna Sejarweni, 2015). Lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah membuka peluang bagi oknum tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran baik itu APBD atau APBN. Dalam upaya pengelolaan laporan keuangan yang akuntabel pemerintah perlu untuk memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kompetensi

sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu disuatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Yendrawati 2013). Indikator dalam kompetensi sumber daya manusia yaitu pendidikan, pengalaman kerja dan sikap.

Berikut ini tabel mengenai kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada Organisasi Perangkat Daerah:

Tabel 1.2
Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada OPD Tahun 2020 dan 2021:

No	OPD	Penganggaran	Seharusnya	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja modal- irigasi dan jaringan	Belanja barang dan jasa-belanja barang diserahkan masyarakat	667.200.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja barang dan jasa- uang untuk diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat	Belanja barang dan jasa- belanja barang diserahkan masyarakat	357.500.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja barang dan jasa- belanja pakaian dan perlengkapan	Belanja barang dan jasa – belanja barang diserahkan masyarakat	9.299.225.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja modal	Belanja barang dan jasa – belanja barang diserahkan masyarakat	1.089.841.580,35
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belanja modal- gedung dan bangunan	Belanja barang dan jasa- belanja barang diserahkan masyarakat	2.041.502.320,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja modal- Peralatan dan Mesin	Belanja barang dan jasa – belanja barang diserahkan masyarakat	1.785.021.350,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja barang dan jasa- bangunan air	Belanja modal – bangunan air	1.672.700.000,00
Jumlah				16.912.990.250,35

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa organisasi masih melakukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tahun 2020 dan 2021. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia belum memadai sehingga masih adanya kesalahan dalam penganggaran sebesar Rp 16.912.990.250,35. Kondisi ini juga tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan yang semestinya, dimana akun belanja barang dan jasa dianggarkan untuk belanja modal, sebaliknya akun untuk belanja modal dipergunakan untuk belanja barang dan jasa sehingga terjadi kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Penelitian ini dilakukan oleh Ariyanto, (2020) dan Hermawan, (2022) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian Sriyono, Sri Suryaningsum dan Istiqomah Shinta Philadelphiah (2020) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Bukti empiris penelitian Hermawan, (2022) dan Rahmadani dan Zulaika, (2023) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah. Sedangkan menurut Hasanah dan Rumondang, (2021)

penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bukti empiris penelitian Varista (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Sriyono, Sri Suryaningsum dan Istiqomah Shinta Philadelphia (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemilihan SKPD Kota Kupang sebagai objek penelitian karena Kota Kupang dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan 2021 secara baik. Dalam jangka waktu dua tahun pemerintah Kota Kupang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangannya. Predikat ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan. Namun dilihat dari fenomena diatas masih ditemukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tiga organisasi perangkat daerah, penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Kupang belum tertib, pengelolaan pendapatan belum memadai, dan pengelolaan aset tetap belum memadai.

Berdasarkan fenomena dan juga penjelasan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada SKPD Kota Kupang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal?.
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal?.
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi oleh sistem pengendalian internal?
7. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi oleh sistem pengendalian internal?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah di atas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap sistem pengendalian internal.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap sistem pengendalian internal
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.
6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi oleh sistem pengendalian internal.
7. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi oleh sistem pengendalian internal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi kontribusi bagi perkembangan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang dan untuk meningkatkan sistem pengendalian internalnya.

2. Bagi Akademisi

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya.

3. Bagi Peneliti

Semoga penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga referensi bagi peneliti berikutnya tentang pengaruh kompetensi dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi.